

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidato Presiden dalam pengantar Nota Keuangan dan Rancangan APBN (R-APBN) 2016, pemerintah untuk pertama kalinya mengalokasikan belanja transfer ke daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementrian/Lembaga (K/L). Hal ini didasarkan atas pertimbangan semakin banyaknya kewenangan yang sudah diserahkan kepada daerah di era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal sendiri adalah kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan *diskresi* seutuhnya masing-masing daerah. Selama tahun 1990-an, desentralisasi fiskal dan reformasi pemerintah daerah telah menjadi salah satu tren yang paling meluas dalam pembangunan. Upaya yang sangat besar dilakukan, bagaimanapun caranya dilakukan hanya untuk membuat kemajuan sederhana menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kinerja yang tidak merata, terjadi perdebatan tentang *desirabilitas* desentralisasi fiskal dan bagaimana mengatasinya (Paul Smoke, 2001). Desentralisasi fiskal merupakan sebuah masalah dan menjadi perhatian utama bagi negara-negara berkembang pada 1990-an. Bahkan kemunculan desentralisasi fiskal di Indonesia sangat dekat dengan isu-isu politik dan kekhawatiran atas disintegrasi nasional (Khusaini, 2006). Bagi negara-negara berkembang, desentralisasi fiskal diyakini menjadi solusi untuk

semua jenis masalah ekonomi dan politik yang dihadapi, namun desentralisasi fiskal juga memiliki potensi masalah, yang menyebabkan masalah baru yang menjadi beban tambahan yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Dalam hal manfaat, beberapa ahli menekankan perlunya desentralisasi fiskal untuk efisiensi ekonomi, efisiensi biaya dalam penyediaan barang publik, peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan mobilitas dana. Dalam hal kerugian, para ahli lain mengatakan bahwa tidak ada manfaat dari desentralisasi fiskal yang dapat dicapai oleh negara-negara yang preferensi populasinya hampir tidak mungkin diakomodasi oleh anggaran pemerintah, dan kapasitas kelembagaan pemerintah lokal sangat rendah. Dari perspektif ini, tampaknya desentralisasi fiskal cenderung meningkatkan biaya, mengurangi efisiensi layanan pemerintah, mendistorsi ekonomi, dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara daerah dan ketidakstabilan ekonomi makro (Prud'homme, 1995 dalam Jumadi, M. Pudjiharjo , Ghozali Maski, Moh. Khusaini, 2013).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (PKPD). Kedua regulasi tersebut sudah mengalami banyak perubahan hingga yang terakhir yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan kemandirian di daerah. Konsekuensinya, daerah menerima pelimpahan kewenangan disegala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan.

Fungsi Pemerintah Pusat hanyalah memberikan *advice* serta monitoring pelaksanaan, dari sinilah yang menjadikan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia semakin jauh dari apa yang dicita-citakan. Dampak desentralisasi fiskal di Australia yaitu adanya dukungan untuk efek ketidakseimbangan, sentralisasi kekuatan perpajakan dan pola pengeluaran yang terdesentralisasi (Philip Bodman, Kelly-Ana Heaton dan Andrew Hodge, 2009).

Daerah justru semakin bergantung kepada Pemerintah Pusat. Besarnya alokasi anggaran dalam APBN, alokasi transfer ke daerah meningkat setiap tahunnya. Data historis menyebutkan dalam tahun 2008 saja besarnya transfer ke daerah sudah mencapai Rp 292,4 triliun atau sekitar 29,6% total belanja negara. Dalam APBN 2011 alokasi tersebut mencapai Rp 412,5 triliun dengan rincian alokasi Dana Perimbangan sebesar Rp 347,5 triliun sementara alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan penyesuaian sekitar Rp 64,9 triliun. Terakhir dalam APBN 2015 pemerintah dan DPR sepakat mengalokasikan transfer ke daerah sebesar Rp 643,8 triliun, sementara alokasi dana desa Rp 20,7 triliun. Keseluruhan alokasi transfer ke daerah 2015, besaran Dana Alokasi Umum (DAU) tetap

mendominasi sebesar Rp 352,8 triliun, disusul Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp Rp 110,0 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 58,8 triliun. Untuk besaran Rp 547,5 miliar dan Dana Transfer lainnya sebesar Rp 104,4 triliun (www.bps.go.id).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersusun dari komponen penerimaan daerah dan belanja daerah ke dalam pos-pos yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan memicu pertumbuhan yang positif pada kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Perimbangan seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam praktiknya masih banyak campur tangan demi kepentingan politis antara pihak eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan kurang efektifnya pengalokasian dana tersebut.

UU Nomor 33 Tahun 2004, dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah yang terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, 3) Pinjaman Daerah, 4) Lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan Asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Jawa Timur merupakan satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI Jakarta), Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi Jawa Timur terletak pada 111,0° hingga 114,4° Bujur

Timur dan 7,12° hingga 8,48° Lintang Selatan. Lokasi Provinsi Jawa Timur berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti provinsi lainnya di Indonesia, wilayah ini mempunyai perubahan musim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya. Batas daerah disebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan Selatan. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudera Hindia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 47.799,75 km² habis terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota.

Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 adalah sebesar Rp 29,35 triliun dan terealisasi sebesar Rp 29,87 triliun atau lebih tinggi 1,81%, dibanding tahun 2016. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 17,3 triliun menyumbang 58% dari total pendapatan, dari sisi jumlah PAD tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 (Rp 15,9 triliun), namun terhadap pendapatan menurun (63,5%). Sedangkan Dana Perimbangan yang tahun 2017 mencapai Rp 12,3 triliun, meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 9,04 triliun. Dana Alokasi Umum pada tahun 2017 sebesar Rp 3,8 triliun, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat Rp 1,67 triliun atau naik 127,5%. Dana Alokasi Khusus juga meningkat dari Rp 5,52 triliun menjadi Rp 7,1 triliun. Perbandingan antara Pendapatan Daerah yang lebih besar dari Belanja Daerah menyebabkan neraca keuangan surplus Rp 0,9 triliun. Sekitar 80% anggaran belanja digunakan untuk belanja langsung, utamanya untuk

pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial (sumber : www.bps.go.id).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004: 96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Dinas Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara). PAD mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kemampuan setiap daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya masing-masing tidak sama, hal tersebut menyebabkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Upaya pemerintah guna menanggulangi ketimpangan fiskal adalah dengan cara pengalokasian dana yang tepat yang bersumber dari APBN untuk membiayai keperluan daerah demi menunjang

pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah. Pengalokasian dana yang tepat akan membuat pembangunan diselenggarakan di daerah berjalan dengan lancar tentunya akan meningkatkan pembangunan manusia di dalamnya.

UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (*horizontal imbalance*) yang hanya bersumber dari PAD. Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja modal pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah belum sepenuhnya terlaksana. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa DAU merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. ”Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar DAK ini diatur lebih lanjut dalam bentuk PP, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Sebagai contoh, penggunaan DAK bidang pendidikan meliputi: Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas, Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, Pengadaan/perbaikan ruang kelas dan lemari perpustakaan, Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah, dan Peningkatan mutu sekolah dengan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan serta fasilitas pendidikan lainnya di sekolah. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana

dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis. Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawabnya, daerah penerima wajib mengalokasikan dana pendamping dalam APBD-nya sebesar minimal 10% dari jumlah DAK yang diterimanya. Untuk daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping yakni daerah yang selisih antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negative. Namun dalam pelaksanaannya tidak ada daerah penerima DAK yang mempunyai selisih antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang dialokasikan kepada tiap-tiap daerah berdasarkan presentase yang bersumber dari APBN. DBH dialokasikan untuk membiayai keperluan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. DBH digunakan demi menanggulangi ketimpangan fiskal vertikal. DBH memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap pendapatan suatu daerah sehingga dapat membiayai belanja daerah dengan baik yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan manusia diartikan sebagai *“a process of enlarging people’s choices”* yang merupakan tahapan dalam peningkatan taraf hidup manusia. Hal ini terungkap dalam publikasi *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui *Human Development Report* tahun 1996

tentang Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep pembangunan manusia ini menutamakan adanya empat unsur diantaranya produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. IPM dilihat berdasarkan 3 faktor utama, yaitu faktor kesehatan, pendidikan dan pendapatan. IPM dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator dasar, yaitu: usia, ilmu yang dimiliki, dan kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Ketiga unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi berpengaruh satu sama lain. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan bahwa IPM dinilai berdasarkan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, kemampuan untuk menjaga kesehatan, mempunyai keterampilan sehingga memperoleh pendapatan yang layak untuk membiayai kebutuhannya. IPM dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah dan merupakan penilaian terhadap pemerataan pembangunan sudah berjalan dengan baik. Sumber dana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Semakin mandiri suatu daerah berarti Pendapatan Asli Daerah mampu membiayai pembangunan daerahnya. Terdapat dana transfer dari pemerintah pusat yang diberi nama dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri adalah dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam rangka untuk melaksanakan otonomi daerah. Dana perimbangan ini terbagi menjadi tiga yaitu terdiri dari Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Penjelasan mengenai dana perimbangan sudah dijelaskan di paragraf

sebelumnya. Dana perimbangan ini digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dalam beberapa sektor, salah satunya adalah dalam hal pembangunan manusia. Indikator dalam menentukan besar kecilnya Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat dalam hal pendidikan, kesehatan dan ketrampilan. Jika dana perimbangan dalam praktiknya dapat mengalokasikan dengan baik dan sesuai prosedur maka IPM akan meningkat. Pembangunan Manusia di Jawa Timur selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dari sebesar 67,55 (tahun 2013) menjadi 70,27 (tahun 2017) atau mengalami pertumbuhan 4,03%. Kategori IPM Jawa Timur Pada Tahun 2017 naik menjadi tinggi. IPM Jawa Timur tahun 2017 tumbuh sebesar 0,76% atau turun 0,39 poin dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Kenaikan IPM 2017 didukung dengan kenaikan seluruh komponen-komponennya. Di antara kabupaten atau kota di Jawa Timur, IPM Kota Surabaya tertinggi (81,07) dan terendah di Sampang (59,90). Sebanyak 19 Kabupaten atau kota mempunyai IPM di atas Jawa Timur, dan sisanya 19 Kabupaten atau kota mempunyai IPM di bawah Jawa Timur. Pembangunan manusia di seluruh Kabupaten atau Kota mengalami kenaikan, bahkan kategori IPM untuk Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri berubah dari “sedang” menjadi “tinggi”. Kabupaten Pasuruan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 1,49%, disusul Kabupaten Jember (1,48%) dan Kabupaten Pamekasan (1,48%). Kenaikan IPM di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah dalam pengalokasian PAD dan Dana perimbangan yang tepat

sasaran, namun hal tersebut tidak dijadikan patokan dalam hal kenaikan IPM di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh PAD, dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Mengapa memilih variable Indeks Pembangunan Manusia? Karena IPM adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, dan IPM Bidang kesejahteraan rakyat mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut, maka upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM terus ditingkatkan, sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas manusia sangat ditentukan antara lain terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan lingkungan. Pembangunan manusia merupakan upaya untuk mengembangkan daya kemampuan Indonesia agar hidup sehat dan berumur panjang, berilmu pengetahuan, kreatif, memiliki akses terhadap sumber daya untuk hidup layak, serta berperan aktif dalam penentuan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan dan pilihan hidupnya. Secara keseluruhan upaya Kemenko Kesra dalam penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, pengembangan investasi SDM dan kemasyarakatan, serta penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat menuai banyak kemajuan. Namun,

masih terdapat beberapa ruang yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. Dari sisi pembangunan manusia masih terdapat ketimpangan antar daerah, hal ini dibuktikan dengan capaian IPM di beberapa daerah yang masih berada di bawah capaian rata-rata IPM secara nasional khususnya di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Dengan demikian, khusus daerah-daerah di mana capaian IPM masih di bawah rata-rata nasional perlu diperkuat dengan pembangunan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas manusianya, seperti pembangunan infrastruktur untuk mempermudah akses ekonomi, peningkatan pelayanan, dan kebutuhan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan (Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategi Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019). Dan mengapa memilih Provinsi Jawa Timur sebagai populasi penelitian, karena di Provinsi Jawa Timur IPM dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Peneliti tertarik meneliti Indeks Pembangunan Manusia yang mengalami kenaikan tersebut dilihat dari unsur PAD, DAU, DAK, dan DBH.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengambil judul : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN

MANUSIA (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

E. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan jurnal dan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini secara sederhana berisi langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini dibahas tentang desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variable, dan metode analisa data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data dan informasi hasil olahan penelitian, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teori yang ditulis dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teori yang telah dikemukakan terdahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka teori atau penjelasan kontekstual masalah yang menjadi permasalahan dan tujuan pembahasan bersangkutan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah dicapai pada masing-masing BAB sebelumnya. Tersusun atas kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.